

JGOP



JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS

VOLUME 4, NOMOR 1 JULI 2022

ISSN 2774-728X (PRINT) ISSN: 2686-3391 (ONLINE)



JGOP.FISIP@UMMAT.AC.ID

In Cooperation With



Daftar Isi (Table of Content)
Journal of Government and Politics
JGOP

Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota
Berkelanjutan

Hairunnisa, Wisda Aprilia Syaka 1-15

Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara
(IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia

Hariati, Annisa Saskia Saputri 16-28

Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam
Perspektif Demokrasi

Heriyanto 29-46

Praktik Citizenship Dalam Melanggengkan Pelayanan
Kesehatan Melalui Posyandu Sebagai Potret Dari New
Public Service Studi Kasus Pada Posyandu Tanjung Kota
Madiun Dan Posyandu Delima Kota Malang

Tia Subekti, Irza Khurunin, Intan Rahmawati 47-63

Implementasi Program Desa Mandiri Di Desa Sebunga,
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Debbie Yuari Siallagan, Heri Yanto, M. Awaluddin 64-77

Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Pelanggan
Laboratorium Pemeriksa COVID-19: Studi kasus di
Laboratorium Biohazard Badan POM

Muhammad Erdiansyah, Fitra Yovita Delviona, Dilin Rahayu Nataningtyas 78-90

Peran Mediasi Ethical Behavior pada Pengembangan
Organizational Citizenship Behaviors Auditor Publik

Elaine Violche Acanthus, Putri Mega Desiana 91-110

Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di
Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Dindin Supratma 111-120

Integrasi Manajemen Talenta dengan Pengembangan
Kompetensi ASN

Rahmat Suparman, Sherwin Mikhael Soantahon 121-132



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391
Vol. 4 No. 1 Juli 2022

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) Di Kalimantan Timur, Indonesia

¹Hariati, ²Annisa Saskia Saputri

^{1,2} Administrasi Publik, FISIP, Universitas Mulawarman, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 23-05-2022

Disetujui: 19-05-2022

Dipublikasikan :

29-07-2022

Kata Kunci :

Forecasting;

Kebijakan, Pembangunan;
Ibu Kota Negara.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan sebuah upaya dalam mewujudkan forecasting kebijakan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dimasa depan. Penelitian ini menggunakan kajian literature yang berlandaskan kepada sumber-sumber terpercaya dan kredibel. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa pembangunan IKN bukan hanya didasarkan kepada persoalan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun perlu dipahami sebagai suatu langkah untuk menghilangkan kesenjangan dan pemerataan kesejahteraan diberbagai wilayah. Pembangunan IKN harus bersifat terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, dalam forecasting kebijakan pembangunan IKN perlu juga memperhatikan prinsip pembangunan yaitu pemahaman prinsip dasar pembangunan IKN, prinsip dasar pembangunan ekonomi, prinsip dasar pembangunan sosial dan sumber daya manusia, prinsip dasar penyediaan dan pengelolaan pertanahan, prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip dasar ini adalah bentuk sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Selain itu sebagai bentuk dari mewujudkan pembangunan IKN yang menyongsong Visi “Kota Dunia untuk Semua”, dengan tujuan untuk membangun Simbol Identitas Nasional, Kota Berkelanjutan di Dunia, Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan.

Best Practice Policy Of Development National Capital City (Ikn) In East Kalimantan, Indonesia

Abstract

This study describes an effort to realize policy forecastings in the development of the National Capital City (IKN) in the future. This study uses a literature review that is based on reliable and credible sources. The results in this study are that the development of IKN is not only based on the issue of moving the country's capital city from Jakarta to East Kalimantan. However, it needs to be understood as a step to eliminate inequality and equitable distribution of welfare in various regions. IKN development must be open, responsible, and involve public participation. In addition, in forecasting IKN development policies need to also pay attention to development principles, namely understanding the basic principles of IKN development, basic principles of economic development, basic principles of social development and human resources, basic principles of land provision, and management, basic principles of environmental protection and management. This basic principle is a form as one of the strategies to realize Indonesia's 2045 economic target, namely more inclusive and equitable economic growth through accelerated development of Eastern Indonesia. In addition, as a form of realizing IKN development that meets the Vision of "World City for All", intending to build a Symbol of National Identity, Sustainable City in the World, Indonesia's Economic Driver in the Future..

2022 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik_Ummat

*Alamat Korespondensi:

Jl. Muara Muntai, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75411,

Email: hariatiunex@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terasa kian nyata. Ini didukung dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan hingga kini, ini dibuktikan dengan telah terbitnya UU IKN dan terpilihnya kepala badan otorita didalam melaksanakan pembangunan IKN dimasa depan. Namun perlu dipahami bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak semata mata hanya memindahkan ibu kota Jakarta-Kaltim perlu sebuah perancangan khusus mengenai persoalan pembangunan IKN kedepannya. Seperti memperhatikan kondisi sosial-ekonomi budaya serta lingkungan (ketahanan bencana) (Silalahi, 2019). Menurut Bappenas ada beberapa pertimbangan Kalimantan Timur di pilih sebagai lokasi IKN baru yaitu (1) lahan luas dan milik pemerintah, berstatus Hutan Produksi dan Perkebunan; (2) berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok; (3) aman dan minim dari ancaman bencana; (4) aksesibilitas lokasi tinggi, dekat 2 kota besar Balikpapan dan Samarinda; (5) tersedia infrastruktur utama (jalan tol Balikpapan-Samarinda dan trans Kalimantan, bandara di Balikpapan dan Samarinda, pelabuhan terminal peti kemas Kariangau Balikpapan dan pelabuhan Semayang Samarinda); (6) tersedia air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai (DAS); (7) memiliki kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan; (8) pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, dan Udara; dan (9) struktur kependudukan heterogen dan terbuka sehingga potensi konflik rendah (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dengan ini perlunya suatu rancangan yang sistematis dan terukur melalui kajian mendalam yaitu dalam hal ini penulis akan mengkajinya melalui kebijakan berbasis peramalan (Forecasting) dalam pembangunan IKN dimasa datang. Peramalan (forecasting) merupakan suatu kegiatan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan data-data yang tersedia dari masa lampau. Peramalan kerap kali digunakan sebagai perencanaan dan operasi kontrol dalam berbagai bidang seperti manajemen produksi, sistem inventori, kontrol kualitas, perencanaan keuangan, dan analisis investasi. Selain itu, peramalan juga digunakan sebagai alat pembuatan keputusan untuk pengeluaran, perencanaan, dan estimasi pertumbuhan di masa yang akan datang. Menurut Webster peramalan adalah dugaan yang dibuat secara sederhana tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini (Aninda, 2021). Ramalan yang dilakukan umumnya akan berdasarkan data yang terdapat pada masa lampau yang dianalisis dengan menggunakan cara-cara tertentu, dalam hal ini perlu

adanya forecast, dengan mengumpulkan, menggunakan dan menganalisa data-data historis serta menginterpretasikan peristiwa-peristiwa di masa mendatang maka forecast dapat dibuat dengan membuat peramalan yang akan di rencanakan secara sistematis dimasa datang (Artisa, 2018). Supaya dapat meminimumkan pengaruh ketidakpastian tersebut. Berdasarkan sebuah pengantar yang sudah dijelaskan diatas maka penulis akan mengambil sebuah rumusan masalah yaitu pertama, Apa yang mendasari pindahnya IKN? Bagaimana Forecasting (ramalan) kebijakan yang disiapkan pemerintah dalam pembangunan IKN di masa datang?

METODE PENELITIAN

Artikel ini membahas tentang Forecasting (ramalan) kebijakan dalam pembangunan IKN di masa depan. maka untuk mendalami topik yang dibahas, penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur yang bersumber dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, selain itu bukti nyata dalam penelitian ini didukung oleh beberapa sumber media massa yang akurat dan terpercaya dalam melakukan penelitian yang mendalam. Tinjauan Literatur, yaitu mengkaji atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam tubuh karya sastra yang berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis pada topik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Sebagai Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pembangunan.

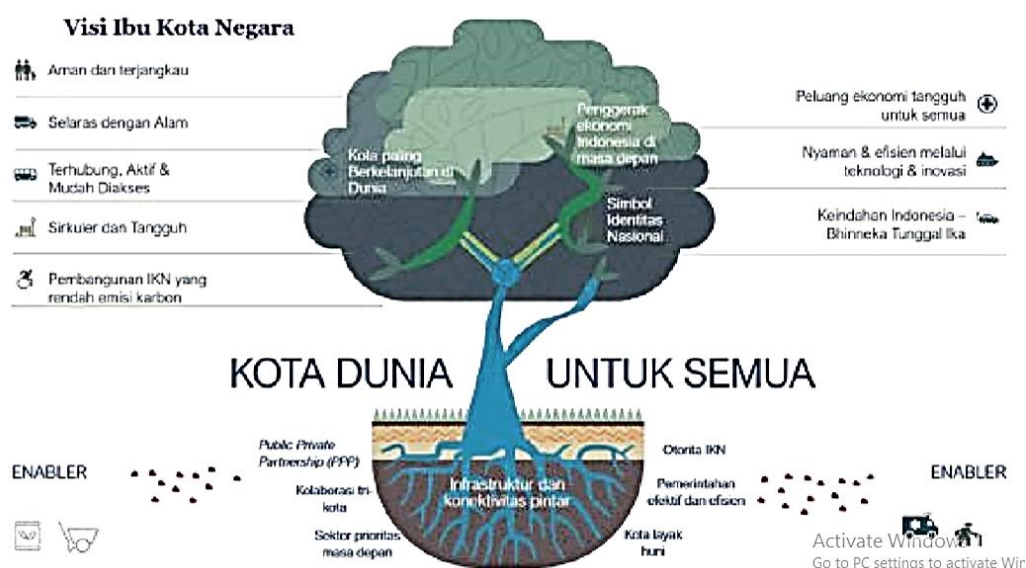
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan luar Wilayah Jawa. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah, yaitu: 1. Lokasi strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II; 2. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap; 3. Lokasi yang berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda; 4. Ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah yang memadai untuk pengembangan IKN; 5. Minim risiko bencana alam. Perencanaan IKN disusun

berdasarkan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment (KLHK, 2019) dan KLHS Masterplan IKN (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Secara administratif, wilayah IKN terletak di dua Kabupaten eksisting yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah IKN berada di sebelah Utara Kota Balikpapan dan sebelah Selatan Kota Samarinda dengan luasan wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Pengembangan wilayah IKN terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yakni:

1. Kawasan Pengembangan IKN (KP IKN), dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare.
2. Kawasan IKN (KIKN), dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektare.
3. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare.

Berdasarkan hal ini maka pembangunan IKN akan menyongsong Visi “Kota Dunia untuk Semua”, dengan tujuan untuk membangun Simbol Identitas Nasional, Kota Berkelanjutan di Dunia, Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan (Bappenas, 2022). (Perhatikan Gambar 1.1).

Gambar 1.1 Penjelasan Visi Kota Ibu Kota Negara



Sumber: di kelola Penulis dari Bappenas,(2022).

Forecasting Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara Di Masa Datang.

Pembangunan IKN dimasa datang bukan sekedar sebagai sebuah bentuk identitas suatu negara. namun juga perlu dipahami sebagai sebuah upaya membangun suatu peradapan berkemajuan. Maka dari itu, di perlukan suatu langkah jitu melalui kebijakan forecasting didalam pembangunan IKN dimasa datang. Adapun melalui forecasting mengenai pemahaman prinsip dasar pembangunan IKN, prinsip dasar pembangunan ekonomi, prinsip dasar pembangunan sosial dan sumber daya manusia, prinsip dasar penyediaan dan pengelolaan pertanahan, prinsip dasar pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adapun penjelasannya sebagai berikut yaitu diantaranya menurut Bappenas,(2022):

A. Prinsip Dasar Pembangunan IKN dalam Bentuk Pengembangan Kawasan

1. Kota Hutan (Forest City)

IKN berlokasi di wilayah yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragamanhayati tinggi. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunan IKN perlu difokuskan pada upaya untuk menjaga keselarasan antara fungsi budidaya dan fungsi lindung khususnyadi kawasan hutan termasuk dalam menjaga, mempertahankan dan merestorasi hutan di wilayah IKN. Kota hutan adalah kota yang menerapkan pendekatan lanskap yang terintegrasi dan didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan dan RTH yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam dan mendukung pembangunanberkelanjutan, khususnyamemaksimalkan penyerapan karbon dan konservasikeanekaragamanhayati, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Gambar 1.2 Prinsip Pembangunan Kota Hutan

Sumber: Bappenas,(2022).



2. Kota Spons (Sponge City)

Sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan • Area perencanaan berperan seperti spons yang menyerap air hujan,

menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer. Tujuannya yaitu Efisiensi sistem sumber daya. Memberikan manfaat rekreasi bagi masyarakat.

3. Kota Smart City

Smart City (Kota Cerdas) telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan dan terhubung. Komponen Smart City mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan. Smart City IKN terdiri atas 3 unsur utama: a. Visi dan hasil yang selaras dengan kerangka kerja strategis menyeluruh IKN b. Wilayah dan strategi cerdas yang mengikhtisarkan peluang digital utama untuk IKN c. Inisiatif cerdas untuk pengembangan kota. Inisiatif Cerdas yang harus diprioritaskan IKN yaitu Akses dan Mobilitas; Lingkungan Hidup dan Iklim; Keamanan dan Keselamatan; Sektor Publik; Sistem Perkotaan; dan Kelayakan Huni dan Kedinamisan.

B. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi

Superhub Ekonomi IKN dirancang untuk menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia melalui strategi ekonomi dan ekosistem relevan. IKN Economic Superhub juga dirancang untuk beroperasi pada tiga tingkatan, yaitu secara domestik, global, dan universal, yang dirangkum dalam visi Reimagined Indonesia: Locally Integrated, Globally Connected, Universally Inspired.

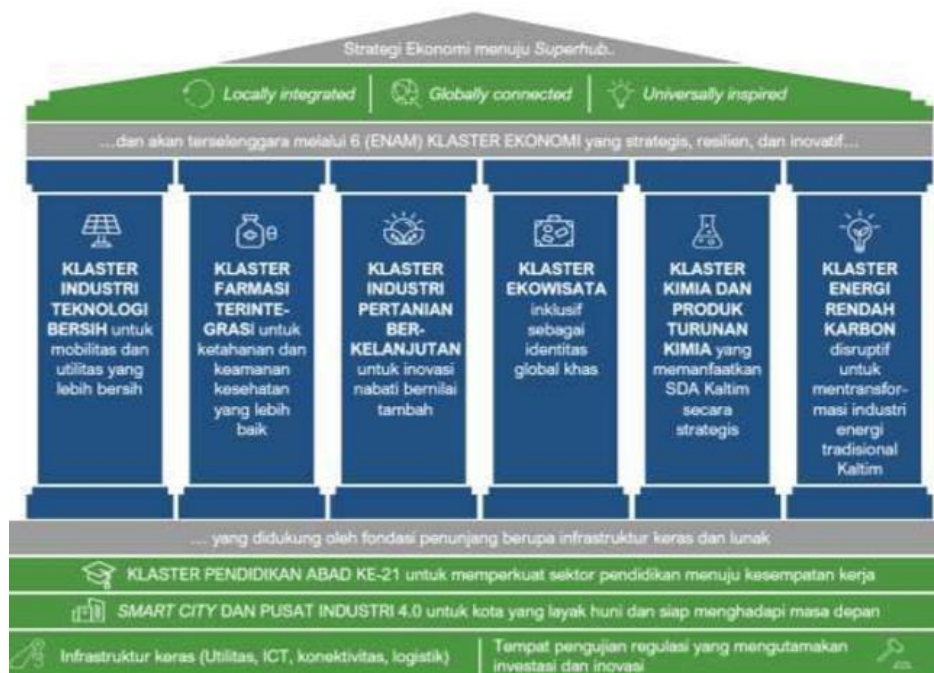
1. Mewujudkan Tujuan Terintegrasi dalam skala lokal melalui: 1. Strategi 3 Kota (IKN-Balikpapan-Samarinda) 2. Sektor Ekonomi Prime-mover 3. Memperkuat Rantai Nilai Domestik untuk wilayah KTI dan Indonesia.
2. Mewujudkan Tujuan Terhubung dalam skala Global . Di tingkat Asia, Ekosistem Superhub akan memperkuat klaster farmasi, petrokimia, serta pertanian dan inovasi pangan. Di tingkat global, Ekosistem Superhub akan memperkuat klaster kota pintar dan pusat teknologi digital, kendaraan listrik, serta ekowisata dan kesehatan
3. Mewujudkan Tujuan memberikan Inspirasi secara Universal – Superhub Ekonomi IKN juga akan menjadi teladan sebagai kota yang hijau, berkelanjutan, dan bertaraf hidup tinggi di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi.

Selanjutnya kerja sama 3 Kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda) adalah suatu mesin penggerak ekonomi untuk Indonesia masa depan. Kota Samarinda sebagai Jantung yaitu Pusat

sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan, Pusat pemerintahan untuk Kalimantan Timur, Mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan, Basis manufaktur baru untuk energi terbarukan. Ibu Kota Negara (IKN) sebagai pusat saraf inti pemerintah dan pusat inovasi hijau untuk wilayah ini. Diantaranya: Pusat layanan pemerintah dan masyarakat, Pusat inovasi dan pusat bakat, Industri bersih dan berteknologi tinggi, Basis untuk pariwisata untuk wilayah tersebut. Sedangkan kota Balikpapan sebagai Otot yaitu simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur, Hilirisasi Industri Pengolahan minyak & gas menjadi petrokimia, Pelabuhan utama untuk provinsi dan wilayah. Dan untu provinsi Kalimantan Timur sebagai Paru-paru yaitu Pertanian Hulu dan Pusat Wisata Alam, Pengembangan wisata alam dan wisata kebugaran, Pengembangan produksi pertanian hulu yang terhubung dengan sektor hilir agriindustri

Prioritas Klaster Ekonomi dan Strategi Klaster Visi IKN Economic Superhub akan diwujudkan melalui 6 klaster ekonomi yang strategis, resilien, dan inovatif, dengan dukungan fondasi yang kokoh dalam bentuk infrastruktur. Proyeksi populasi yang akan tinggal di IKN pada 2045 berkisar dari 1,7 hingga 1,9 juta jiwa yang dapat memberikan dukungan pada sektor ekonomi.

Gambar 1.3 Prioritas Klaster Ekonomi



Sumber: Bappenas 2020.

C. Prinsip Dasar Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Prinsip Dasar Pembangunan Sosial Mengakui keragaman komunitas, baik penduduk lokal maupun pendatang baru. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar lokasi IKN tidak dikecualikan dari perencanaan dan pengembangan kota serta akan mendapatkan manfaat dari pengembangan IKN dan akan memberikan kontribusi bagi IKN dengan cara mengintegrasikan kegiatan komunikasi, kegiatan pembangunan ekonomi, dan strategi spasial sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada sekarang maupun yang akan ada setelah IKN dibangun. Pertama, Pengembangan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan yang difokuskan dengan melibatkan dan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berkesinambungan. Kedua, Pembangunan kompetensi untuk memastikan kesempatan kerja yang inklusif dan merata. Ketiga, Pemerataan akses ke fasilitas dan ruang publik untuk menghubungkan seluruh komunitas yang ada untuk membentuk identitas IKN. Keempat, Pengadaan lahan berdasarkan aturan dan kebijakan atau standar yang bertujuan untuk memfasilitasi perlindungan sosial. Kelima, Revitalisasi dan penataan kawasan permukiman masyarakat lokal mempertimbangkan keterkaitan dengan mata pencaharian dan keterikatan warisan sejarah dan budaya. Selain itu secara konkrit fokus pembangunan IKN:

1. Kesehatan, Definisi Sehat Menurut WHO *Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity*. "Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap/utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan". Definisi Sehat Menurut UU No.36/2009 (Pasal 1 Ayat 1) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengembangan framework kota sehat perlu mempertimbangkan 3 aspek, mencakup: 1) Individu 2) Masyarakat 3) Lingkungan
2. Pendidikan, Prinsip dasar pendidikan di K-IKN secara keseluruhan akan diarahkan kepada konsep pendidikan Abad 21 yang selaras dengan visi pendidikan di K-IKN, yaitu i. membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi serta menjadi teladan penyelenggara pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup. Intervensi di tingkat kejuruan ii. Penting untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan tersier lanjutan di bidang STEM dan manajemen iii. Pendidikan K12 berkualitas tinggi menjadi kriteria utama untuk menarik minat pendatang.
3. Ketenagakerjaan, Penciptaan Lapangan Kerja, Pada tahap awal pembangunan IKN, penciptaan lapangan kerja akan bertumpu sepenuhnya pada sektor konstruksi. Dalam

jangka menengah dan panjang, pemindahan IKN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi penggerak ekonomi untuk Kalimantan Timur dan kawasan lainnya di seluruh penjuru pulau Kalimantan dan sekitarnya. Pelibatan Tenaga Kerja Lokal. a. Kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, kuota afirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal (dalam bentuk pembekalan keterampilan/skilling dan alih kompetensi/reskilling). b. Untuk meningkatkan keahlian dan/atau membuat masyarakat di IKN dan wilayah mitra memperoleh keahlian baru, maka Transformasi BLK di sekitar wilayah IKN menjadi salah satu strategi di dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar.

D. Prinsip Dasar Penyediaan dan Pengelolaan Pertanahan, Prinsip Dasar Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kepala Badan Otorita IKN diberikan kewenangan mengelola wilayah IKN dan diberikan hak pengelolaan atas tanah oleh Kementerian ATR/BPN. Pengalihan HAT di IKN wajib mendapatkan persetujuan Kepala Otorita IKN. Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian Tanah di IKN. Selanjutnya, Pengembangan lingkungan hidup difokuskan pada pemeliharaan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta restorasi jaringan hijau dan biru. Lahan-lahan yang sensitif secara ekologi, kawasan jelajah satwa, dan hutan yang penting untuk spesies yang terancam punah, dilindungi sebagai komponen penting struktur kota dan menentukan identitas IKN.

Lahan-lahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan KPI untuk mendukung konsep *Forest City*. Upaya untuk melestarikan alam memulihkan kawasan bekas tambang, mendukung ketahanan pangan, dan menunjang sistem infrastruktur yang efisien, dirancang untuk memberikan manfaat secara langsung bagi penduduk IKN sehingga menjamin kelayakan hidup penduduk dan menghormati batas-batas lingkungan alam. Pemanfaatan produksi pangan lokal yang dipenuhi oleh strategi ketahanan pangan IKN sejalan dengan strategi IKN yang menginginkan parameter perancangan perkotaan terkait produksi pangan berbasis ekonomi sirkular (*circular economy*). Rancangan kota IKN membangun hubungan baru antara ekologi dan manusia guna mencerminkan prinsip-prinsip yaitu selaras dengan alam; IKN dengan *net zero emission*; serta sirkular dan tangguh.

Berdasarkan penjelasan mengenai forecasting dalam sebuah kajian mendalam berdasarkan laporan Bappenas mengenai pembangunan IKN dimasa datang maka bisa

dikatakan bahwa kebijakan yang direkomendasikan dan rencanakan telah sesuai dengan arah tujuan yang ingin dicapai kedepannya dengan memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan melalui kajian perencanaan yang sistematis dan terukur. Artinya Dengan demikian kebijakan hanyalah merupakan sebuah awal dan belum dapat dijadikan indikator dari keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (forecasting) akan masa depan yang masih bersifat semu, abstrak dan konseptual. Namun ketika telah masuk di dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilan maupun ketidakberhasilan kebijakan akan diketahui (Sari, 2019; Sudirman, 2021). Karena Bahasan tentang peramalan (forecasting) adalah suatu hal yang penting didalam penjelasan tentang kebijakan publik, karena dari forecasting akan diketahui seperti apa kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masa depan, kemudian dapat dilakukan intervensi melalui kebijakan pemerintahan, Forecasting merupakan kegiatan untuk menentukan informasi faktual tentang situasi dimasa depan atas dasar informasi yang ada sekarang (Habeahan, 2017). Tujuan peramalan (forecasting) adalah : (1) memberikan informasi mengenai kebijakan di masa depan dan konsekuensinya; (2) melakukan kontrol dan intervensi kebijakan guna mempengaruhi perubahan, sehingga akan mengurangi resiko yang lebih besar (Irawan,Latif & Wahyuningsih, 2016).

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dapat di kesimpulan bahwa pembangunan IKN bukan hanya persoalan mengenai perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Klatim, Namun perlu dipahami sebagai sebuah langkah untuk mengurangi kesenjangan (disparitas) antar wilayah dan menjadi sebuah daya saing baru dalam peningkatan nilai tambah suatu negara selain itu menjadi suatu identitas suatu bangsa dan bernegara. Maka, diperlukan suatu forecasting kebijakan yang mendasari pembangunan IKN bisa berjalan dengan baik yaitu melalui adanya keterbukaan, partisipasi publik, dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini perlunya suatu dasar prinsip pembangunan IKN yaitu. pemahaman prinsip dasar pembangunan IKN, prinsip dasar pembangunan ekonomi, prinsip dasar pembangunan sosial dan sumber daya manusia, prinsip dasar penyediaan dan pengelolaan pertanahan, prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip dasar ini adalah bentuk sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Selain itu sebagai bentuk dari mewujudkan pembangunan IKN yang menyongsong Visi “Kota Dunia untuk

Semua”, dengan tujuan untuk membangun Simbol Identitas Nasional, Kota Berkelanjutan di Dunia, Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninda, N. (2021). Kajian Trend Forecasting Ready To Wear Indonesia Trend Forecasting (ITF) 2019/2020 Sebagai Pendukung Kebijakan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). *Center Of Education Journal (CEJou)*, 2(01), 48-62.
- Artisa, R. A. (2018). Policy Paper: Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Nasional. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 9-23.
- Bappenas. (2022). Laporan Rencana Induk IKN DAN Lampiran UU IKN. <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/March2022/c9IVSaQqMGEtSQKMiVvt.pdf>
- Habeahan, R. S. (2017). Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Silencer Pegagan Julu V Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
- Irawan, T., Latif, R. V. N., & Wahyuningsih, W. (2016). Analisis Existing Dan Forecasting Puskesmas Blud Kota Pekalongan: Upaya Menuju Kemandirian Pengelolaan Layanan Kesehatan Primer. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 11.
- Kementrian Lingkungan Hidup. (2019). Perencanaan IKN disusun berdasarkan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment .
- Kementerian PPN/Bappenas.(2020). Lampiran Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024: Proyek Prioritas Strategi.
- Sari, D. P. (2019). Analisis Forecasting Terhadap Performance Bank Rakyat Indonesia Syariah Di Kabupaten Kepahiang (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara. *Info Singkat*.
- Sudirman, I. (2021). Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020.